



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

# ANTISIPASI DAN PENANGGULANGAN KRISIS ENERGI

**Dewi Wuryandani**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[dewi.wuryandani@dpr.go.id](mailto:dewi.wuryandani@dpr.go.id)

## Isu dan Permasalahan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden No. 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Permen ESDM tersebut menjelaskan cadangan operasional dan kebutuhan minimum energi yang digunakan untuk kepentingan publik sebagai pengguna akhir secara nasional. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa cadangan operasional minimum bahan bakar minyak (BBM) diatur selama 7 hari ketahanan stok pada terminal BBM dan stasiun pengisian bahan bakar pada satu wilayah distribusi niaganya. Untuk tenaga listrik, Permen ESDM yang diundangkan pada 18 Oktober 2022 itu menyebut cadangan operasional minimum daya mampu tenaga listrik sebesar kapasitas satu unit pembangkit listrik terbesar yang tersambung ke sistem setempat.

Adapun untuk *liquefied petroleum gas* (LPG), disebutkan harus mencukupi selama 3 hari ketahanan stok pada terminal LPG dan stasiun pengisian *bulk* LPG atau stasiun pengisian dan pengangkutan *bulk* LPG di suatu wilayah distribusinya. Terakhir, kebutuhan minimum pelanggan gas bumi dalam Permen ESDM tersebut ditetapkan sebesar 70% dari kebutuhan normal pelanggan pada suatu wilayah distribusi. Aturan baru itu juga memungkinkan pemerintah untuk memberikan kemudahan perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pembebasan lahan untuk tindakan penanggulangan krisis dan darurat energi.

PT Pertamina Patra Niaga selaku *subholding commercial and trading* PT Pertamina (Persero), memastikan bahwa stok BBM dan LPG saat ini jauh melebihi batas yang diamanatkan oleh Permen ESDM No. 12 Tahun 2022. Irto Ginting, Plt Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, mengatakan saat ini stok BBM jenis Pertalite yang paling banyak digunakan oleh masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 17 hari ke depan. Hal yang sama juga terjadi pada stok LPG, di mana pasokan LPG yang dimiliki perseroan saat ini bisa mencukupi kebutuhan masyarakat untuk 16 hari mendatang.

Aturan teknis mengenai antisipasi dan penanggulangan krisis energi seharusnya dikeluarkan pemerintah sejak lama. Apalagi, Peraturan Presiden yang menjadi payung hukum Permen ESDM No. 12 Tahun 2022 telah dikeluarkan sejak Tahun 2016. Stok ketahanan energi memang harus menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Terlebih, saat ini krisis energi menjadi salah satu isu yang paling diwaspadai oleh negara-negara lain di dunia.

Selain itu, sebaiknya pemerintah memberikan kepastian anggaran terkait dengan pemenuhan stok ketahanan energi, karena selama ini ketahanan energi, khususnya BBM dan LPG selalu dikelola oleh PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) dan menjadi hal yang cukup memberatkan bagi perseroan. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran negara untuk memastikan stok ketahanan energi selalu berada dalam level aman. Pemerintah

juga perlu menggenjot produksi hulu minyak dan gas bumi serta mengembangkan industri pengolahan agar Indonesia tidak terus bergantung kepada impor.

Aktivitas diversifikasi energi dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi serta energi baru dan energi terbarukan (EBET) juga bisa menjadi opsi yang dapat diambil untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyebutkan bahwa transisi energi ke EBET merupakan salah satu upaya meningkatkan ketahanan energi nasional. Dan salah satu yang didorong pemerintah saat ini terkait dengan transisi energi adalah pemanfaatan bahan bakar nabati atau *biofuel*. Presiden Jokowi mengharapkan pemanfaatan bahan bakar nabati melalui program bioetanol dapat berjalan sesuai rencana, dimulai dari bioetanol 5% atau E5 pada BBM, kemudian meningkat menjadi E10, E20, dan seterusnya. Adapun untuk kualitasnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan bahwa pada tahun 2021 Tim Studi Bioetanol Institut Teknologi Bandung (ITB) telah melakukan kajian pencampuran etanol 5% ke dalam Peralite yang memiliki RON 90, dan menghasilkan BBM dengan kualitas yang sama seperti Pertamina (RON 92).

## Atensi DPR

Saat ini krisis energi menjadi salah satu isu yang paling diwaspadai oleh banyak negara di dunia. Oleh karena itu, stok ketahanan energi harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk memastikan kebutuhan masyarakat akan energi terpenuhi. Pemerintah perlu memberikan kepastian anggaran terkait dengan pemenuhan stok ketahanan energi. Dukungan Komisi VII DPR RI yang membidangi energi sangat diperlukan dalam penyediaan anggaran untuk memastikan stok ketahanan energi selalu berada pada level aman. Namun, Komisi VII DPR RI juga harus terus melakukan fungsi pengawasannya terhadap upaya pemerintah memenuhi stok ketahanan energi. Selanjutnya, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) sebagai pelaksanaan fungsi legislasi, sebaiknya dapat disegerakan.

## Sumber

*Bisnis Indonesia*, 8 November 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Riyadi Santoso  
Dian Cahyaningrum  
Rafika Sari  
Venti Eka Satya

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022